

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hampir seluruh negara sedang berkembang saat ini menjadikan pembangunan sebagai prioritas dan komitmen bangsa untuk mengejar ketertinggalannya dalam berbagai aspek di kehidupan. Salah satunya adalah aspek pembangunan ekonomi yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara (Sarwedi, 2010). Pembangunan telah menjadi suatu proses kegiatan yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua negara, karena dengan adanya globalisasi yang disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah memiliki dampak dalam perubahan dan pembaruan dalam semua aspek kehidupan manusia (Asih, 2015).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses kegiatan dimana pemerintah daerah beserta masyarakatnya mengelolah sumber daya dan potensi yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan atau kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan berbagai lapangan pekerjaan baru, serta merangsang pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut, Arsyad (2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk (2018) menyebutkan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Kemampuan memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Keunggulan atau daya saing suatu sektor ekonomi bukan saja menjadi alat pemacu pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi juga menjadi indikator penting sebagai penciptaan lapangan kerja baru dalam jangka

panjang agar mampu menyerap tenaga kerja disuatu daerah. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan keseriusan serta komitmen pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada sebagai prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Pemerintah daerah dituntut mengenali potensi yang dimiliki daerahnya karena menurut (Blakely: 1994) dalam (Kuncoro, 2010) suatu proses pembangunan yang berdasarkan pada suatu pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya fisik potensial dapat menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakatnya dan menstimulasi aktivitas ekonomi baru berbasis lokal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Katiandagho (2016) menyebutkan bahwa untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, maka suatu daerah harus mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis didaerah tersebut. Secara teoritis, meningkatnya sektor basis daerah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan asumsi terjadi peningkatan investasi. Penelitian dari Syaiful dkk (2014) juga menyebutkan bahwa sampai saat ini pendekatan sektoral masih merupakan salah satu strategi dalam pembangunan daerah. Pendekatan sektor basis ini lebih menekankan pada pemilihan sektor-sektor ekonomi yang dapat lebih tepat dan cepat berperan sebagai penggerak ekonomi daerah, penyerap tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Pendekatan sektoral lebih difokuskan kepada upaya peningkatan produktivitas sektor ekonomi melalui prioritas pembangunan dalam kebijakan daerah. Oleh karena itu, analisis tentang sektor yang menjadi basis/ keunggulan ekonomi di setiap wilayah menjadi sangat penting dilakukan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dengan demikian

akan diketahui sektor mana yang menjadi sektor basis dan paling besar peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini. Selain itu, keunggulan suatu sektor dapat pula dilihat dari indikator daya saingnya. Oleh karena itu daya saing sektor basis perlu pula dilihat, sehingga dapat diketahui ke depan sektor basis mana yang memiliki daya saing yang kuat sebagai sumber kekuatan ekonomi daerah.

Selain strategi peningkatan pembangunan melalui sektor basis, tenaga kerja juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembangunan. Faktor tenaga kerja tidak hanya dilihat sebagai satu bagian unit dalam penciptaan output, tetapi juga bagaimana kualitas tenaga kerja tersebut dapat berinteraksi dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan suatu nilai tambah (produktivitas) (Purwanti, 2009). Meningkatnya produktivitas tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan nilai tambah yang dihasilkan. Selain pasar uang dan pasar barang, pasar tenaga kerja juga menentukan bekerjanya suatu sistem ekonomi dalam pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2009) juga menyebutkan bahwa selama proses pembangunan berlangsung, sektor – sektor ekonomi akan terus mengalami perubahan. Sama halnya dengan perubahan persentase penduduk yang berkerja di berbagai sektor ekonomi. Hal – hal tersebut sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu daerah serta pembangunan sumberdaya manusia dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu masalah penting dalam pembangunan daerah adalah penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah, yang berarti tenaga kerja mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh. Sehingga

dapat diketahui kondisi ketenagakerjaan juga dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial dan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Untuk meningkatkan tingkat kemandirian suatu daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah melalui UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah harus lebih giat dan cerdas dalam menggali dan mengembangkan potensi daerahnya untuk meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Dengan kewenangan besar yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mewajibkan pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama – sama berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang ada untuk mengetahui prioritas pembangunan daerah tersebut.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menyumbang proporsi PDRB tertinggi di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. Dengan distribusi persentase PDRB paling besar ada di Industri Pengolahan diharapkan mampu menjadi sektor yang meningkatkan perekonomian, seperti yang dapat dilihat dari tabel Distribusi PDRB dibawah ini.

**Tabel 1.1 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 - 2017 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Gresik**

| No  | Lapangan Usaha                                                 | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1.  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 7.08  | 7.39  | 7.58  | 7.73  | 8.21  | 8.38  | 8.27 |
| 2.  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 13.95 | 13.11 | 12.32 | 12.22 | 8.71  | 7.02  | 7.60 |
| 3.  | Industri Pengolahan                                            | 48.01 | 48.15 | 48.06 | 48.21 | 49.22 | 48.73 | 47.9 |
| 4.  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0.50  | 0.48  | 0.44  | 0.44  | 0.46  | 0.47  | 0.51 |
| 5.  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 0.06 |
| 6.  | Konstruksi                                                     | 7.69  | 7.69  | 7.96  | 8.26  | 8.81  | 9.47  | 9.72 |
| 7.  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 10.84 | 11.13 | 11.50 | 11.32 | 12.10 | 12.86 | 12.9 |
| 8.  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 2.11  | 2.12  | 2.16  | 2.20  | 2.30  | 2.36  | 2.37 |
| 9.  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1.02  | 1.05  | 1.07  | 1.12  | 1.22  | 1.32  | 1.34 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi                                       | 3.58  | 3.59  | 3.63  | 3.43  | 3.63  | 3.82  | 3.85 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 0.97  | 1.02  | 1.07  | 1.06  | 1.13  | 1.19  | 1.17 |
| 12. | Real Estat                                                     | 1.21  | 1.17  | 1.16  | 1.11  | 1.18  | 1.24  | 1.22 |
| 13. | Jasa Perusahaan                                                | 0.26  | 0.26  | 0.27  | 0.26  | 0.27  | 0.28  | 0.28 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.29  | 1.34  | 1.28  | 1.15  | 1.21  | 1.27  | 1.24 |
| 15. | Jasa Pendidikan                                                | 0.79  | 0.82  | 0.82  | 0.80  | 0.83  | 0.86  | 0.85 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0.34  | 0.35  | 0.35  | 0.35  | 0.37  | 0.38  | 0.38 |
| 17. | Jasa Lainnya                                                   | 0.29  | 0.27  | 0.26  | 0.27  | 0.29  | 0.30  | 0.29 |

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Gresik memiliki struktur ekonomi yang berbasis sektor sekunder atau sektor yang mengelola barang primer menjadi barang jadi dengan distribusi PDRB paling banyak ada di sektor industri pengolahan dengan kontribusi tahun 2017 sebesar 47.9% terhadap PDRB Kabupaten Gresik. Kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan adalah sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 12.9%. Kemudian kontribusi terbesar ketiga adalah

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan menyumbang 8.27%. Distribusi PDRB Kabupaten Gresik seterusnya dari tahun 2011 sampai tahun 2017 masih didominasi 3 sektor utama yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang berkerja di Kabupaten Gresik dari tahun 2011-2017 mengalami fluktuasi seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2 Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran Terbuka, Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk yang Berkerja di Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2017**

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Pengangguran (%) | Jumlah Angkatan Kerja | Jumlah Penduduk yang Berkerja |
|-------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2011  | 6.48                    | 5.93             | 569098                | 535346                        |
| 2012  | 6.92                    | 6.78             | 571038                | 532304                        |
| 2013  | 6.05                    | 4.55             | 619688                | 591514                        |
| 2014  | 7.04                    | 5.06             | 592569                | 562559                        |
| 2015  | 6.58                    | 5.67             | 611721                | 577049                        |
| 2016  | 6.65                    | 4.81             | 589994                | 561681                        |
| 2017  | 5.38                    | 4.54             | 664523                | 632529                        |

Sumber : Kabupaten Gresik dalam Angka, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi, begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang berkerja di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami penurunan menjadi 5.38%, dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi yaitu 664.523 jiwa, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gresik masih belum maksimal dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4.54% dan jumlah penduduk yang berkerja yaitu 632.529 jiwa. Hal tersebut menandakan bahwa

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik tidak diiringi dengan kenaikan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Gresik menandakan bahwa sektor - sektor mata pencaharian yang tercermin dalam PDRB belum dimaksimalkan potensinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Sektor – sektor yang berkontribusi paling besar dalam PDRB Kabupaten Gresik yaitu sektor industri pengolahan dan sektor industri perdagangan besar dan eceran diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang akhirnya menyerap tenaga kerja di kedua sektor tersebut.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka identifikasi dan analisis sektor ekonomi yang menjadi basis dan mampu menyerap tenaga kerja dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Gresik sangat penting untuk dikaji secara lebih terinci, sehingga sektor – sektor potensial di Kabupaten Gresik dapat lebih dikembangkan. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang akan dikembangkan, maka penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik menjadi lebih baik dan terarah sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Salah satu masalah serius dalam pembangunan ekonomi suatu daerah di Indonesia adalah pesatnya pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menghasilkan angkatan kerja dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini dapat menyebabkan angkatan kerja yang tersedia belum terserap secara maksimal. Dengan adanya permasalahan ini diharapkan

dapat dicari solusi dan masukan kepada pemerintah daerah dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan yang berpihak pada penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan - permasalahan sebagai berikut :

1. Sektor – sektor apa sajakah yang menjadi basis dan non basis untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana penyerapan tenaga kerja sektor basis dan non basis di Kabupaten Gresik?

### **1.3 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok penelitian agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi tentang sektor basis, non basis dan penyerapan tenaga kerja.
2. Informasi yang disajikan yaitu : penentuan sektor basis, non basis dan penyerapan tenaga kerja yang ada.
3. Informasi yang disajikan hanya pada lokasi penelitian yaitu Kabupaten Gresik

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan, secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sektor – sektor yang menjadi basis dan non basis untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja sektor basis dan non basis di Kabupaten Gresik

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain :

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis :**

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi dalam teori ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi regional.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis :**

1. Untuk pemerintah, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi, khususnya dalam hal pengembangan sektor basis dan non basis beserta penyerapan tenaga kerjanya.
2. Untuk swasta, diharapkan menjadi bahan rujukan ketika melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor basis dan non basis beserta penyerapan tenaga kerja.
3. Untuk masyarakat, diharapkan menjadi referensi pengetahuan tentang ekonomi regional, khususnya sektor basis dan non basis serta penyerapan tenaga kerja.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Kerangka sistem penulisan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain, disesuaikan dengan materi pembahasan yang di

teliti. Secara umum pembahasan tiap bab (terdiri dari beberapa sub bab) dijabarkan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar baik teoritis maupun fakta yang menimbulkan minat untuk melakukan penelitian, rumusan masalah yang memerlukan pemecahan dan jawaban melalui penelitian yang dilakukan serta tentang tujuan yang ingin di capai serta manfaat penelitian bagi khasanah ilmu pengetahuan dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membuat uraian tentang landasan teori yang berisi tentang teori dan konsep relevan dengan permasalahan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Selain itu dalam bab ini juga di cantumkan mengenai penelitian sebelumnya serta model analisis yang digunakan.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang pendekatan penelitian yang akan dilakukan, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data dan metode analisis data.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Menguraikan analisis deskriptif dan objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.